

LAMPIRAN  
LAPORAN TAHUNAN KPK  
2018



DIREKTORAT  
PENDIDIKAN  
DAN  
PELAYANAN  
MASYARAKAT

**PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

**1. Internalisasi Integritas di Sektor Pendidikan**

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
1	Diseminasi Pendidikan Antikorupsi untuk Jenjang Pendidikan Tinggi	<p>KPK terus mendorong terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi (PAK) di jenjang pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dengan Nomor: 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Pendidikan Tinggi.</p> <p>Untuk itu, KPK bekerja sama dengan Kemenag dan Kemristek Dikti, melaksanakan "Workshop Diseminasi Pendidikan Antikorupsi untuk Jenjang Pendidikan Tinggi" untuk mempersiapkan sumber daya yang akan menjadi agen-agen perubahan untuk melakukan implementasi tersebut serta mendiseminasikan panduan-panduan pembelajaran yang telah dikembangkan oleh KPK, seperti buku panduan dan video pembelajaran. Guna efektifitas dan efisiensi, pelaksanaan kegiatan dipetakan ke dalam 3 lokus wilayah, yakni wilayah Indonesia barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, dan mengundang perwakilan perguruan tinggi dari masing-masing wilayah. Total seluruh kegiatan diikuti 42 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Wilayah Indonesia Timur (Kota Gorontalo, 19-21 September 2018)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Sam Ratulangi</li> <li>2. Universitas Ihsan Gorontalo</li> <li>3. Poltekkes Kemenkes Gorontalo</li> <li>4. Universitas Muhammadiyah Gorontalo</li> <li>5. IAIN Sultan Amai Gorontalo</li> <li>6. Universitas Negeri Gorontalo</li> <li>7. Universitas Gorontalo</li> <li>8. Universitas Muhammadiyah Gorontalo</li> <li>9. Universitas Negeri Gorontalo</li> <li>10. Universitas Papua</li> </ol> <p>b. Wilayah Indonesia Barat (Kota Yogyakarta, 25-27 September 2018)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Diponegoro</li> <li>2. Universitas Negeri Yogyakarta</li> <li>3. UIN Sumatera Utara</li> <li>4. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa</li> <li>5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</li> <li>6. Universitas Jambi</li> <li>7. Institut Teknologi Surabaya</li> <li>8. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta</li> <li>9. UIN Raden Fatah Palembang</li> <li>10. Universitas Negeri Yogyakarta</li> <li>11. IAIN Jember</li> <li>12. UPN Veteran Yogyakarta</li> <li>13. UIN Ar-Raniry Banda Aceh</li> <li>14. Universitas Maritim Raja Ali Haji</li> <li>15. Universitas Andalas</li> <li>16. Universitas Negeri Malang</li> </ol>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Universitas Bengkulu</li> <li>18. UIN Sunan Ampel Surabaya</li> <li>19. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</li> <li>20. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh</li> <li>21. Universitas Ahmad Dahlan</li> <li>22. UIN Sunan Ampel Surabaya</li> </ol> <p>c. Wilayah Indonesia Tengah (Kota Pontianak, 2-4 Oktober 2018)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Tanjungpura</li> <li>2. IAIN Palangkaraya</li> <li>3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak</li> <li>4. Universitas Mataram</li> <li>5. UIN Mataram</li> <li>6. IAIN Kendari</li> <li>7. Universitas Udayana</li> <li>8. Universitas Borneo Tarakan</li> <li>9. Universitas Lambung Mangkurat</li> <li>10. Universitas Palangkaraya</li> <li>11. IAIN Samarinda</li> <li>12. Universitas Halu Oleo</li> <li>13. Politeknik Negeri Pontianak</li> <li>14. Universitas Hasanuddin</li> <li>15. Universitas Negeri Makassar</li> </ol>
2	Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Stakeholder Perguruan Tinggi dalam Mengimplementasikan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Bersih dan Baik	<p>Impelementasi Tata kelola Perguruan Tinggi yang Bersih dan Baik menjadi salah satu fokus kegiatan yang dilakukan oleh KPK pada 2018. Perbaikan dalam hal tata kelola perguruan tinggi menjadi penting untuk diperhatikan guna menciptakan ekosistem yang kondusif sejalan dengan implementasi Pendidikan Antikorupsi yang juga diupayakan pada tiap perguruan tinggi.</p> <p>Untuk menguatkan implementasi tersebut, KPK menggandeng perguruan tinggi di Indonesia dengan melaksanakan Workshop Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Stakeholder Perguruan Tinggi dalam Mengimplementasikan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Bersih dan Baik sebagai salah satu upaya mendorong perguruan tinggi untuk dapat melakukan perbaikan dan penguatan dalam tata kelola perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun tata kelola dibidang non-akademik .</p> <p>Guna efektifitas dan efisiensi kegiatan, pelaksanaan workshop perguruan tinggi di Indonesia dibagi ke dalam 3 lokus wilayah, yakni barat, tengah dan timur, dengan peserta sebanyak 83 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.</p>
		<p>a. Wilayah Indonesia Timur (Surabaya, 16 s.d. 18 Oktober 2018)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Mataram</li> <li>2. Universitas Hasanuddin</li> <li>3. IAIN Samarinda</li> <li>4. IAIN Ambon</li> <li>5. Universitas Airlangga</li> <li>6. IAIN Palangkaraya</li> <li>7. Universitas Sulawesi Barat</li> <li>8. UIN Alauddin Makassar</li> <li>9. Universitas Mulawarman</li> <li>10. Universitas Haluoleo</li> <li>11. IAIN Kediri</li> <li>12. Universitas Mulawarman</li> <li>13. IAIN Ternate</li> </ol>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		14. Universitas Negeri Gorontalo 15. Universitas Negeri Makassar 16. UIN Malang 17. Universitas Papua 18. IAIN Manado 19. Universitas Sam Ratulangi 20. Universitas Pattimura 21. Poltekke Maluku 22. IAIN Tulungagung 23. IAIN Ponorogo 24. Universitas Palangkaraya 25. Institut Teknologi Sepuluh November 26. UIN Sunan Ampel 27. Universitas Udayana 28. IAIN Gorontalo 29. IAIN Bengkulu 30. Universitas Negeri Gorontalo 31. Universitas Islam Malang 32. UIN Alauddin Makassar 33. IAIN Pare-Pare 34. Universitas Khairudin 35. Universitas Negeri Malang 36. IAIN Salatiga 37. IAIN Pontianak 38. Universitas Tanjungpura 39. UIN Malang 40. UIN Mataram 41. Universitas Tanjung Pura 42. IAIN Kendari 43. UNIPA 44. IAIN Ternate  b. Wilayah Indonesia Tengah dan Barat (Semarang, 6 s.d. 8 November 2018) 1. UIN Raden Intan Lampung 2. Universitas Jambi 3. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 4. Universitas Borneo Tarakan 5. Universitas Negeri Yogyakarta 6. IAIN Surakarta 7. IAIN Purwokerto 8. Universitas Lampung 9. UIN Ar-Raniry Banda Aceh 10. Universitas Tidar
		11. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta 12. Universitas Negeri Jakarta 13. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 14. Universitas Terbuka 15. IPB 16. Universitas Negeri Semarang 17. Universitas Syiah Kuala 18. Universitas Sebelas Maret 19. Universitas Sriwijaya 20. Universitas Riau 21. UIN Sultan Syarif Kasim Riau 22. Universitas Gadjah Mada 23. Universitas Pendidikan Indonesia 24. Universitas Negeri Medan

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		25. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 26. Universitas Negeri Padang 27. Universitas Jenderal Soedirman 28. Universitas Bengkulu 29. IAIN Bengkulu 30. Universitas Nusa Cendana 31. UIN Imam Bonjol Padang 32. Universitas Andalas 33. Universitas Maritim Raja Ali Haji 34. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang 35. UIN Sumatera Utara 36. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 37. UIN Walisongo 38. UPN Veteran Jakarta
3	Kolaborasi Kegiatan dengan mitra strategis perguruan tinggi dalam Festival Akademia Antikorupsi (FAA) dalam Rangkaian Acara Diesnatalis IPB	<p>Festival Akademia Antikorupsi (FAA) merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka kegiatan Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dilaksanakan pada 19 dan 21 September 2018. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) dari 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk menggalang gerakan antikorupsi dan menegaskan peran penting perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi.</p> <p>Adapun rangkaian kegiatan FAA ini adalah Sarasehan dengan tema: "Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Gerakan Antikorupsi", dan juga Talkshow dengan tema "Peran Strategis Multipihak dalam Gerakan Indonesia Antikorupsi" serta berbagai lomba antikorupsi yang melibatkan mahasiswa.</p> <p>Forum yang melibatkan Dewan Guru Besar dari 11 PTNBH ini menghasilkan beberapa rekomendasi tindak lanjut dalam pendidikan antikorupsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan Center of Anticorruption Movement Kampus akan melaksanakan program-program yang mendorong gerakan antikorupsi.</li> <li>2) Implementasi Pendidikan Antikorupsi Kampus akan mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk yang menyesuaikan kondisi masing-masing.</li> <li>3) Pembentukan Pool of Expert/ Expert on Call Dibentuk guna memudahkan pelibatan ahli-ahli dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.</li> <li>4) Perbaikan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kampus menerapkan prinsip-prinsip <i>good and clean governance</i>.</li> </ol>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL																																				
4	Pengembangan panduan pembelajaran antikorupsi pada mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN), serta Etika Profesi.	<p>Sejak 2006, KPK telah melaksanakan pendidikan antikorupsi dengan melibatkan mitra-mitra strategis dengan membangun panduan, modul-modul pembelajaran antikorupsi, dan instrumen/media untuk mendukung implementasi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.</p> <p>Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, KPK telah menyusun pedoman penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui mata pelajaran PKN di sekolah yang wajib dipahami dan dijalankan oleh seluruh mitra strategis pendidikan jenjang dasar dan menengah. Tahapan yang dilaksanakan pada 2018 adalah:</p> <p>a. Uji Coba Panduan KPK telah melaksanakan kegiatan uji coba Pengembangan Panduan Inseri Pembelajaran Antikorupsi dalam Mata Pelajaran PPKN untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di beberapa sekolah di Jabodetabek, yakni: SDN Maja, SDN Kosambi, SDN Gorda 2, SDN Rancailat, SDN Songgom Jaya, SDN Koper2, MAN 4 dan MTSN 3 Jakarta.</p> <p>b. Diseminasi Panduan Diseminasi Panduan Tata Kelola Sekolah Berintegritas dan Inseri Pembelajaran Anti Korupsi Melalui Mata Pelajaran PPKN untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan di:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Provinsi</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah Sekolah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gorontalo</td> <td>18-21 September 2018</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>25-29 September 2018</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Maluku Utara</td> <td>09-12 Oktober 2018 ,</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kalimantan Selatan</td> <td>24-27 Oktober 2018</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>6-17 November 2018</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Riau</td> <td>9-10 November 2018</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sumatera Utara</td> <td>14-15 Desember 2018</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH</td> <td>257</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Provinsi	Tanggal	Jumlah Sekolah	1	Gorontalo	18-21 September 2018	42	2	Jawa Tengah	25-29 September 2018	30	3	Maluku Utara	09-12 Oktober 2018 ,	36	4	Kalimantan Selatan	24-27 Oktober 2018	33	5	DKI Jakarta	6-17 November 2018	35	6	Riau	9-10 November 2018	30	7	Sumatera Utara	14-15 Desember 2018	51	JUMLAH			257
NO	Provinsi	Tanggal	Jumlah Sekolah																																			
1	Gorontalo	18-21 September 2018	42																																			
2	Jawa Tengah	25-29 September 2018	30																																			
3	Maluku Utara	09-12 Oktober 2018 ,	36																																			
4	Kalimantan Selatan	24-27 Oktober 2018	33																																			
5	DKI Jakarta	6-17 November 2018	35																																			
6	Riau	9-10 November 2018	30																																			
7	Sumatera Utara	14-15 Desember 2018	51																																			
JUMLAH			257																																			
5	Pengembangan panduan pembelajaran Antikorupsi untuk jenjang pendidikan tinggi	<p>KPK menyusun dan mengembangkan panduan pembelajaran sebagai bahan pelengkap implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi dengan mencoba memasukkan hal tersebut dengan menginsersikan di Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) untuk mata kuliah PPKN dan Pancasila serta untuk mata kuliah Etika Profesi.</p> <p>Tahun 2018 KPK bekerja sama dengan perguruan tinggi telah menyusun modul pembelajaran tersebut. Untuk mata kuliah MKWU, pengembangan panduan dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan (Prodi PPKN) serta Pusat Pengembangan Etika Universitas Atmajaya Jakarta. Adapun <i>output</i> dari kegiatan ini adalah Buku Panduan Pembelajaran Antikorupsi untuk Jenjang Pendidikan Tinggi.</p>																																				

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
6	Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan	<p>Untuk mendukung proses pelaksanaan pendidikan antikorupsi, tersebut diperlukan adanya sebuah panduan strategi komunikasi sebagai acuan dalam melaksanakan bentuk komunikasi baik keluar maupun kedalam agar selaras dengan tujuan sehingga menciptakan pemahaman yang jelas dan sama.</p> <p>Adapun <i>output</i> dari kegiatan ini adalah adanya panduan strategi komunikasi pendidikan antikorupsi.</p>
6	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan	<p>Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi merupakan sebuah forum yang mempertemukan seluruh mitra strategis sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, baik tingkat pusat maupun daerah di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada 11-12 Desember 2018 ini digelar untuk mendorong implementasi pendidikan antikorupsi dan tata kelola pendidikan yang berintegritas di seluruh jenjang pendidikan, melalui komitmen yang dituangkan dalam rencana aksi dan kebijakan yang terstruktur dan mengikat pada setiap jenjang pendidikan.</p> <p>Komitmen tersebut ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin.</p> <p>Adapun poin-poin komitmen yang ditandatangani, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan yang mewajibkan pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan dengan selambat-lambatnya Juni 2019;</li> <li>2. Menyusun dan mendistribusikan materi pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan;</li> <li>3. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;</li> <li>4. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus/ pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan budaya Antikorupsi;</li> <li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik;</li> <li>6. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implemetasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta penerapan tata kelola pendidikan yang baik dan bersih disetiap jenjang; dan</li> <li>7. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK.</li> </ol>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
7	Pengembangan panduan pembelajaran antikorupsi di mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta Etika Profesi.	Guna menyediakan panduan-panduan pembelajaran antikorupsi, KPK juga memiliki fokus dalam penyusunan dan pengembangan pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi. Adapun di tahun 2018, mata kuliah yang menjadi fokus adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Etika Profesi. Penyusunan panduan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## 2. Sistem Integritas Partai Politik

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
1	Program Pilkada Berintegritas: Pembekalan Calon Kepala Daerah	<p>Kegiatan Program Pilkada Berintegritas dilaksanakan untuk mengidentifikasi isu dan perkembangan yang sedang terjadi, kebutuhan peserta dalam rangka peningkatan peran serta, dan menyebarkan informasi dan pemahaman pemberantasan korupsi, khususnya mengenai Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Nilai-nilai Integritas kepada Calon Kepala Daerah.</p> <p>Pada 2018, program Pilkada Berintegritas dilaksanakan melalui kegiatan Pembekalan Calon Kepala Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dilaksanakan di 15 provinsi selama bulan April hingga Mei 2018. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPK bekerjasama dengan Kemendagri, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPU RI, KPU Provinsi, Pemerintah Provinsi, FORKOPIMDA, dan media lokal. Pembekalan Calon Kepala Daerah diawali dengan deklarasi LHKPN oleh paslon kepala daerah, temu media lokal masing-masing provinsi, dan sosialisasi kepada komunitas.</p> <p>Adapun pelaksanaan pembekalan dilaksanakan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi Bangka Belitung (5 April 2018)</li> <li>2. Provinsi Sumatera Selatan (10 April 2018)</li> <li>3. Provinsi Jawa Timur (12 April 2018)</li> <li>4. Provinsi Sulawesi Utara (12 April 2018)</li> <li>5. Provinsi Jawa Barat (17 April 2018)</li> <li>6. Provinsi Sulawesi Selatan (17 April 2018)</li> <li>7. Provinsi Sulawesi Tenggara (19 April 2018)</li> <li>8. Provinsi Sumatera Utara (24 April 2018)</li> <li>9. Provinsi Maluku (26 April 2018)</li> <li>10. Provinsi Aceh (26 April 2018)</li> <li>11. Provinsi Nusa Tenggara Barat (3 Mei 2018)</li> <li>12. Provinsi Nusa Tenggara Timur (3 Mei 2018)</li> <li>13. Provinsi Kalimantan Tengah (3 Mei 2018)</li> <li>14. Provinsi Kalimantan Barat (8 Mei 2018)</li> <li>15. Provinsi Jawa Tengah (8 Mei 2018)</li> </ol>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
2	Replikasi Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB)	<p>Kelas replikasi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) adalah inisiasi KPK sejak tahun 2017 yang diawali dengan komunikasi dengan kepala daerah sasaran. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan Kelas Replikasi PCB oleh KPK kepada daerah pada tahun 2018. Provinsi yang berkomitmen melaksanakan kelas replikasi PCB tahun 2018 adalah DKI Jakarta Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat. Inisiator kelas replikasi PCB adalah Badan Kesbangpol atau Dinas Pemuda dan Olahraga tiap daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelas Replikasi PCB DKI Jakarta: 4-5 Juli 2018 dan 19-20 September 2018</li> <li>2. Kelas Replikasi PCB NTT: 24-26 Oktober 2018</li> <li>3. Kelas Replikasi PCB Sumatera Barat: 8-10 November 2018</li> </ol>
3	Kajian Term of Assessment (ToA) Sistem Integritas Partai Politik	<p>Kajian ini adalah kerja sama KPK dengan Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah dimulai sejak 2017. Pada 2018 disempurnakan kembali dengan menambahkan komponen "Demokrasi Internal" pada Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik dan alat penilaian mandiri (<i>self assessment/ToA</i>) oleh partai politik. Selain itu, dilakukan penyempurnaan dalam pembobotan dan metode penilaian.</p> <p>Rangkaian beberapa rangkaian kegiatan dalam kajian ini di antaranya adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan partai politik, pemerintah, akademisi, NGO, dan sejumlah <i>stakeholders</i> untuk menyempurnakan ToA SIPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD ToA SIPP Narasumber Partai Politik (25 Juli 2018)</li> <li>2. FGD ToA SIPP Narasumber Non Partai Politik (26 Juli 2018)</li> <li>3. FGD ToA SIPP Narasumber LIPI dan KPK (27 Juli 2018)</li> <li>4. Konsinyering ToA SIPP I (30 Juli-1 Agustus 2018)</li> <li>5. Konsinyering ToA SIPP II (15-16 dan 27 Agustus 2018)</li> <li>6. Sharing Knowledge ToA SIPP LIPI dan KPK (10 September 2018)</li> <li>7. Diseminasi ToA SIPP ke Partai Politik (22 November 2018)</li> </ol> <p>Pada November 2018 dihasilkan buku panduan SIPP disertai dengan brosur dan infografis sehingga mudah untuk dipahami aktor politik. Diseminasi buku panduan SIPP dilakukan sebagai upaya mengenalkan komponen integritas dan menekankan komitmen kepada partai politik untuk implementasi SIPP dengan melakukan penilaian mandiri. Penilaian dilakukan oleh partai politik dengan bukti dokumen yang dimiliki partai politik baik mengenai kode etik, sistem rekrutmen dan kaderisasi, demokrasi internal serta tata kelola keuangan partai politik. Kegiatan <i>self-assesment</i> ini baru akan dilaksanakan pada tahun depan.</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
4	Inisiatif Usulan Penyempurnaan Undang-Undang Partai Politik	<p>Sebagai kegiatan lanjutan dari penyusunan SIPP adalah menyusun naskah usulan penyempurnaan substansi Undang-Undang Partai Politik yang mengakomodir Sistem Integritas Partai Politik. Naskah tersebut berisi tentang Pokok-Pokok Usulan Penyempurnaan UU No. 8/2008 Jo No. 2/2011 tentang Partai Politik.</p> <p>Rangkaian kegiatan kajian dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan partai politik, pemerintah, akademisi, NGO, dan sejumlah mitra untuk menyempurnakan usulan penyempurnaan UU Parpol. Penyusunan lebih lanjut dengan melakukan konsinyasi Tim KPK dengan P2P LIPI. Naskah usulan ini akan disampaikan kepada Presiden / Kemendagri dan mendorong menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Tahun 2019 dan 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD Penyempurnaan RUU Parpol I Narasumber Akademisi (28 Agustus 2018)</li> <li>2. FGD Penyempurnaan RUU Parpol II Narasumber Parpol (29 Agustus 2018)</li> <li>3. FGD Penyempurnaan RUU Parpol III Narasumber Pemerintah K/L (4 September 2018)</li> <li>4. Konsinyering Penyempurnaan RUU I Parpol (5-7 September 2018)</li> <li>5. Konsinyering Penyempurnaan RUU Parpol II (20-21 September 2018)</li> <li>6. Konsinyering Penyempurnaan RUU Parpol III (1-3 Oktober 2018)</li> <li>7. FGD Review Naskah Penyempurnaan RUU Parpol Narasumber Pemerintah K/L, LIPI, CSO (29 Oktober 2018)</li> </ol>
5	Kajian Pembinaan Sistem Pemilihan Kepala Daerah	<p>Kajian Pembinaan Sistem Pemilihan Kepala Daerah merupakan kajian evaluatif tentang pelaksanaan Pilkada secara Langsung, khususnya terkait fenomena banyaknya calon kepala daerah dan kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi. Pada akhirnya dihasilkan sebuah solusi alternatif atas persoalan potensi korupsi yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung. Kajian ini dilaksanakan berkerjasama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).</p> <p>Rangkaian kajian dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan partai politik, pemerintah, akademisi, NGO, dan sejumlah stakeholders untuk menyempurnakan kajian pembinaan sistem Pilkada. Kegiatan FGD juga dilakukan di 3 daerah yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur.</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD Pembinaan Sistem Pilkada Narasumber Akademisi dan CSO (2 Agustus 2018)</li> <li>2. FGD Pembinaan Sistem Pilkada Narasumber Parpol dan Pemerintah K/L (3 Agustus 2018)</li> <li>3. FGD Pembinaan Sistem Pilkada di Sumatera Barat (12-14 September 2018)</li> <li>4. FGD Pembinaan Sistem Pilkada di Sulawesi Utara (26-28 September 2018)</li> <li>5. FGD Pembinaan Sistem Pilkada di Jawa Timur (8-10 Oktober 2018)</li> <li>6. Konsinyering Pembinaan Sistem Pilkada I (16 Oktober 2018)</li> <li>7. Konsinyering Pembinaan Sistem Pilkada II (5 November 2018)</li> <li>8. Konsinyering Pembinaan Sistem Pilkada III (19 November 2018)</li> </ol> <p>Penyusunan lebih lanjut dengan melakukan konsinyasi dengan P2P LIPI. Adapun naskah usulan Pembinaan Sistem Pilkada akan disampaikan kepada Presiden/Kemendagri.</p>
6	Diskusi Publik Pencegahan Korupsi di Sektor Politik	<p>Pengetahuan dan kesadaran mengenai politik yang berintegritas adalah hal yang perlu menjadi perhatian dan terus disosialisasikan secara masif agar tercipta iklim politik yang berintegritas. Dalam rangka hal tersebut, KPK mengidentifikasi ada 2 (dua) hal yang menjadi prioritas dalam program pencegahan korupsi di sektor politik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi Integritas di Partai Politik melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan penyempurnaan pada RUU Partai Politik</li> <li>2. Pembinaan Sistem Pemilihan Kepala Daerah</li> </ol> <p>Diseminasi atas kajian KPK dan LIPI dilakukan ke masyarakat Indonesia melalui forum akademis berupa diskusi publik di kampus dengan melibatkan mahasiswa, NGO, KPU Kab/Kota/Provinsi, Bawaslu Kab/Kota/Provinsi, Parpol tingkat Provinsi, dan Badan Kesbangpol Provinsi</p> <p>Kegiatan dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan pokok yang perlu dibenahi dalam sistem politik nasional khususnya terkait tata kelola partai politik dan sistem pilkada, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan di Sektor Politik untuk membangun Sistem politik yang berintegritas di Indonesia, dan menyediakan forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait implementasi Sistem integritas partai politik dan Sistem Pilkada Berintegritas.</p> <p>Pada 2018, kegiatan Diskusi Publik Pencegahan Korupsi di Sektor Politik dilaksanakan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Gajah Mada Yogyakarta 29 November 2018</li> <li>2. Universitas Andalas Padang 12 Desember 2018</li> <li>3. Universitas Airlangga Surabaya 19 Desember 2018</li> </ol>

### 3. Pelibatan Komunitas Sebagai Advokasi Pelayanan Publik

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
1	Program Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi	<p>Program Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi adalah sebuah kegiatan yang mengawal dan memonitoring kualitas pelayanan publik di daerah dengan melibatkan forum kolaborasi antara komunitas sebagai perwakilan masyarakat sipil dengan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).</p> <p>Sejak 2017, telah terbentuk Forum Kolaborasi di beberapa daerah, salah satunya di Provinsi Banten dengan nama LIMASAKTI (Lintas Masyarakat Anti Korupsi) di Kabupaten Pandeglang dan KOMPAK (Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi) di Kabupaten Lebak. Sebagai tindak lanjut pembentukan forum tersebut, dilaksanakan beberapa program lanjutan, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop SOP Pelayanan Publik oleh OPD Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan DPMPD kepada Komunitas, 6-7 Maret 2018.</li> <li>2. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Kolaborasi Program Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi di Banten, 2-3 Juni 2018.</li> <li>3. Koordinasi Teknis Rencana Aksi Kolaborasi Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi di Lebak dan Pandeglang dan Banten, 19-20 Agustus 2018.</li> <li>4. Melakukan kegiatan Aksi Kolaborasi Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi di 6 desa di Pandeglang dan Lebak, 5-10 September 2018 untuk memonitoring kualitas layanan publik sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah. Pada sesi ini, tim aplikasi Jaga juga ikut melakukan Aksi Kolaborasi di 2 Desa, bersama Tim UX/UI dalam mendapatkan masukan untuk pengembangan aplikasi JAGA.</li> <li>5. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Kualitas Pelayanan Publik di 6 Desa Kab Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, 29-30 September 2018.</li> <li>6. Pelaporan Hasil Monitoring Kualitas Layanan Publik dan Penyusunan Rekomendasi untuk Bupati Lebak-Pandeglang, 1 Oktober 2018.</li> </ol> <p>Selain di Banten, Forum Komunikasi juga telah terbentuk di Provinsi Riau, dengan nama Forum MARWAH (Masyarakat Riau Anti Rasuah). Forum ini telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat memasukkan kegiatan Forum MARWAH di tahun 2018. Untuk dapat memonitor hasil capaian Forum Kolaborasi dalam mengawal kualitas Layanan Publik di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan dana desa, Forum MARWAH mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat membuat tools monitoring di bawah BAPPEDA Provinsi. Beberapa sesi yang dilakukan pada 2018 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak Lanjut FORUM MARWAH bersama Bappeda Provinsi dan seluruh Kab/Kota di Riau dalam rangka mengembangkan Metode Alat Monitoring Berbasis Dampak dalam Pencegahan Korupsi di Riau, 29-31 Mei 2018.</li> <li>2. Monitoring Kualitas Layanan Publik di 3 desa di Provinsi Riau dengan menggunakan TOOLS BAPPEDA Provinsi Riau, 21-24 November 2018</li> </ol> <p>Di samping itu, pada 2018 dilaksanakan juga kegiatan inisiasi dan sosialisasi Program Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi di Provinsi Gorontalo (3-6 April 2018) dan Maluku Utara (24-27 April 2018)</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
2	Jambore Komunitas Antikorupsi 2018	<p>Jambore Komunitas Anti Korupsi 2018 adalah sebuah kegiatan konsolidasi para alumni Sekolah Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK maupun CSO mitra, dan para agen dari CSO pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Makassar pada 21-14 Oktober 2018 ini, sebanyak 66 peserta dari seluruh Indonesia saling bertukar cerita capaian, metode, dan strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, baik di area antikorupsi ataupun pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Adapun rencana tindak lanjut kegiatan adalah para alumni diharuskan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di daerah asal masing-masing terkait nilai-nilai antikorupsi, Dana desa, dan Politik berintegritas. Para alumni Jambore Komunitas Antikorupsi harus melaporkan implementasi rencana tindak lanjut tersebut melalui situs integrity.id, yang merupakan platform berbagi untuk agen-agen perubahan antikorupsi yang dimulai dari kegiatan Anticorruption Youth Camp 2017. Dari 66 peserta yang hadir, sebanyak 12 Peserta telah melaksanakan RTL dan mengunggah di Integrity.id</p>
3	Sekolah Pemuda Desa 2018	<p>Sekolah Pemuda Desa adalah program yang digagas sejak 2017 oleh KPK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Komunitas Ketjilbergerak di Yogyakarta dengan nama "Energi Muda Desa Untuk Negeri", kegiatan ini ditujukan untuk membangun kapasitas dan kolaborasi pemuda desa dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.</p> <p>Pada 2018, kegiatan diikuti oleh sebanyak 60 orang perwakilan karang taruna dari 4 Kabupaten di Yogyakarta. Serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari sarasehan desa, sekolah desa dan diakhiri dengan "Festival Pemuda Desa" yang diinisiasi oleh Alumni Sekolah Pemuda Desa 2017 dan 2018 untuk mengkampanyekan capaian dan hasil yang didapat ke masyarakat umum.</p> <p>Dari kegiatan ini, setiap alumni membuat proposal untuk melakukan implementasi terhadap rencana proposal yang sudah dibuat selama pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan Sekolah Desa 2018, terdapat 20 proposal yang kemudian dipresentasikan dan akan diindaklanjuti untuk dilakukan penguatan di komunitas sekolah pemuda desa dan di desa masing-masing. Selain itu, para alumni diharuskan berkolaborasi dengan alumni lain untuk melakukan peningkatan kompetensi melalui program mandiri yang dilakukan secara periodik dan kebutuhan pengetahuan ditentukan oleh alumninya.</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
4	Pengelolaan Aplikasi JAGA	<p>Aplikasi JAGA merupakan platform penyedia informasi publik dan media bertukar informasi (cerita dan diskusi) antarkementerian/ lembaga terkait dengan masyarakat. Informasi yang disajikan meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan dana desa. JAGA menyediakan beragam informasi publik mengenai prosedur, hak dan kewajiban, dan regulasi bidang pendidikan, kesehatan dan dana desa dalam satu platform secara kontekstual dan <i>user friendly</i>.</p> <p>Pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam platform ini adalah KPK sebagai insiator, kementerian/ lembaga sebagai wali data dan sumber informasi, serta masyarakat sebagai pengguna dan penerima informasi yang kemudian dapat menjadi <i>agent of change</i>.</p> <p>Adapun informasi publik yang akan dihimpun dan nantinya dapat diakses melalui platform ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan (Sekolah, dana BOS, Program Indonesia Pintar, Penerimaan Peserta Didik Baru, dsb)</li> <li>2. Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, klinik, BPJS, dsb)</li> <li>3. Dana desa (anggaran desa, pembangunan desa, partisipasi masyarakat, dsb)</li> </ol> <p>Selain itu, dalam aplikasi ini disediakan pula kanal pengetahuan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur atau tahapan proses pelayanan publik</li> <li>2. Kewajiban dan hak yang dapat diterima dari layanan publik</li> <li>3. Aturan atau regulasi yang mendasari layanan publik</li> <li>4. Penyampaian keluhan atau pengaduan terkait layanan publik</li> </ol>

#### 4. Pelatihan Bersertifikat SKKNI di ACLC

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL																																				
1	Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi di TUK LSP P-II KPK melalui Jalur RPL	<p>Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Jalur Pengalaman/ RPL di TUK LSP KPK sebanyak 7 angkatan dengan peserta yang lulus sertifikasi Penyuluh Antikorupsi sebanyak 133 orang.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Angkatan</th> <th>Tanggal</th> <th>Peserta Tersertifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Angkatan 1</td> <td>20-21 Februari 2018</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Angkatan 2</td> <td>20-22 Maret 2018</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Angkatan 3:</td> <td>17-20 April 2018</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Angkatan 4</td> <td>23-25 Mei 2018</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Angkatan 5</td> <td>31 Juli-2 Agustus 2018</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Angkatan 6</td> <td>29-31 Agustus 2018</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Angkatan 7</td> <td>12-14 Desember 2018</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI</td> <td>133</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Angkatan	Tanggal	Peserta Tersertifikasi	1	Angkatan 1	20-21 Februari 2018	13	2	Angkatan 2	20-22 Maret 2018	6	3	Angkatan 3:	17-20 April 2018	19	4	Angkatan 4	23-25 Mei 2018	21	5	Angkatan 5	31 Juli-2 Agustus 2018	10	6	Angkatan 6	29-31 Agustus 2018	29	7	Angkatan 7	12-14 Desember 2018	37	JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI			133
NO.	Angkatan	Tanggal	Peserta Tersertifikasi																																			
1	Angkatan 1	20-21 Februari 2018	13																																			
2	Angkatan 2	20-22 Maret 2018	6																																			
3	Angkatan 3:	17-20 April 2018	19																																			
4	Angkatan 4	23-25 Mei 2018	21																																			
5	Angkatan 5	31 Juli-2 Agustus 2018	10																																			
6	Angkatan 6	29-31 Agustus 2018	29																																			
7	Angkatan 7	12-14 Desember 2018	37																																			
JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI			133																																			

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL																																				
2	Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi di TUK Sewaktu melalui Jalur Diklat	<p>Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Jalur Diklat yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian sebanyak 2 angkatan. Peserta yang mengikuti Diklat sebanyak 100 orang dan yang telah dinyatakan lulus sertifikasi sebanyak 61 Penyuluh Antikorupsi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Angkatan</th> <th>Tanggal</th> <th>Peserta Tersertifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BPSDM Kem-dagri RI Jakarta</td> <td>20-21 Februari 2018</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Jakarta</td> <td>17 – 19 Oktober 2018</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sertifikasi di TUK LSP KPK</td> <td>12 – 14 Desember 2018</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Angkatan	Tanggal	Peserta Tersertifikasi	1	BPSDM Kem-dagri RI Jakarta	20-21 Februari 2018	13	2	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Jakarta	17 – 19 Oktober 2018	38	3	Sertifikasi di TUK LSP KPK	12 – 14 Desember 2018	10	JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI			61																
NO.	Angkatan	Tanggal	Peserta Tersertifikasi																																			
1	BPSDM Kem-dagri RI Jakarta	20-21 Februari 2018	13																																			
2	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Jakarta	17 – 19 Oktober 2018	38																																			
3	Sertifikasi di TUK LSP KPK	12 – 14 Desember 2018	10																																			
JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI			61																																			
3	Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi di TUK Sewaktu melalui Jalur RPL/Pengalaman	<p>Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Jalur Pengalaman yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Perguruan Tinggi sebanyak 7 angkatan. Peserta yang telah dinyatakan lulus sertifikasi sebanyak 147 Penyuluh Antikorupsi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Angkatan</th> <th>Tanggal</th> <th>Peserta Tersertifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta</td> <td>20-21 Februari 2018</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Universitas Paramadina Jakarta</td> <td>3 – 5 Oktober 2018</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar</td> <td>24 – 26 Oktober 2018</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BBPK Kemenkes 1</td> <td>7 – 9 November 2018</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BBPK Kemenkes 2</td> <td>14 – 16 November 2018</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BPSDMD Jawa Tengah</td> <td>21 – 23 November 2018</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poltekkes Kemenkes Malang</td> <td>27 – 29 November 2018</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI</td> <td>147</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Angkatan	Tanggal	Peserta Tersertifikasi	1	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	20-21 Februari 2018	14		Universitas Paramadina Jakarta	3 – 5 Oktober 2018	13		Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar	24 – 26 Oktober 2018	8		BBPK Kemenkes 1	7 – 9 November 2018	26		BBPK Kemenkes 2	14 – 16 November 2018	34		BPSDMD Jawa Tengah	21 – 23 November 2018	34		Poltekkes Kemenkes Malang	27 – 29 November 2018	17	JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI			147
NO.	Angkatan	Tanggal	Peserta Tersertifikasi																																			
1	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	20-21 Februari 2018	14																																			
	Universitas Paramadina Jakarta	3 – 5 Oktober 2018	13																																			
	Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar	24 – 26 Oktober 2018	8																																			
	BBPK Kemenkes 1	7 – 9 November 2018	26																																			
	BBPK Kemenkes 2	14 – 16 November 2018	34																																			
	BPSDMD Jawa Tengah	21 – 23 November 2018	34																																			
	Poltekkes Kemenkes Malang	27 – 29 November 2018	17																																			
JUMLAH PESERTA TERSERTIFIKASI			147																																			



5. Pengembangan Konsep Antikorupsi di Sektor Swasta

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
1	Komite Advokasi Nasional (KAN) Antikorupsi	<p>Merupakan forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha di tingkat nasional dalam menghasilkan solusi atas kendala berusaha yang berpotensi dan berisiko terjadinya tindak pidana korupsi. Komite Advokasi Nasional ini dilaksanakan di lima sektor strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur Di tahun 2018, yang menjadi prioritas di sektor ini adalah kelistrikan dengan melibatkan asosiasi (kontraktor) dan asosiasi profesi yang bergerak di bidang tersebut. Transparency International Indonesia sebagai perwakilan masyarakat sipil yang memiliki fokus kepada sektor ini juga dilibatkan. Kegiatan dilaksanakan di kantor KPK pada 27 Juli 2018 dan 18 Oktober 2018</li> <li>2. Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Di tahun 2018, kajian mengenai perizinan sektor hulu migas menjadi isu utama. Di sektor ini melibatkan Indonesia Petroleum Association (IPA), Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kegiatan dilaksanakan di kantor KPK pada 16 Agustus 2018 dan 25 September 2018</li> <li>3. Pangan Di tahun 2018, selain menindaklanjuti Pokja Gula yang menjadi salah satu isu di tahun sebelumnya, sektor ini kembali menjangkau daftar isian masalah dari komoditas lain seperti beras, daging/sapi, unggas dan makanan/minuman (kemasan). Di antara asosiasi yang dilibatkan selain Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara lain GAPUSPINDO, APTINDO, AGRI, AGI, ARPHUIN, PERPADI dan GAPMI. Di sektor pangan, KAN juga berhasil mendorong pembentukan Pokja Gula untuk mendorong transparansi dan integrasi data dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian No 624/Kpts/OT.050/8/2018 Tentang Kelompok Kerja Gula Nasional, tertanggal 29 Agustus 2018. Kegiatan dilaksanakan di kantor Kadin Indonesia (31 Juli 2018) dan kantor KPK (23 Agustus 2018)</li> <li>4. Kehutanan Kegiatan di sektor ini pada tahun 2018 difokuskan pada pengembangan kapasitas (capacity building) bagi anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) untuk menyosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk dampak sosial korupsi, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi. Kegiatan dilaksanakan di KPK (13 Juli 2017) dan Kementerian LHK ( 5 September 2018 dan 10 Oktober 2018)</li> <li>5. Kesehatan Di sektor ini, isu yang menjadi pembahasan adalah pengadaan alat kesehatan, spesifik pada kendala e-catalogue (LKPP) dengan melibatkan Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI). Dari sisi regulator, Kementerian Kesehatan juga diundang ke dalam forum. Kegiatan dilaksanakan di KPK pada 20 Juli 2017 dan 16 Agustus 2018.</li> </ol>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
2	Pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi	<p>Konsep komite ini sama dengan Komite Advokasi Nasional (KAN), hanya saja dibentuk di tingkat provinsi dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan asosiasi daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan perizinan (DPMPTSP), pengadaan barang dan jasa (ULP), Inspektorat, dan dinas-dinas lain jika diperlukan. KAD Antikorupsi tidak bersifat sektoral, melainkan menampung berbagai isu yang memiliki celah tindak pidana korupsi dalam lingkungan berusaha di daerah.</p> <p>Hingga 2018, sudah terlaksana inisiasi pembentukan KAD di 33 provinsi, 8 di antaranya dilakukan di 2017. Selain melakukan inisiasi pembentukan, dilakukan juga koordinasi tindak lanjut (pendampingan) yang sudah terlaksana di 11 provinsi. Sampai dengan tahun 2018, sudah ada 2 Provinsi yang telah memiliki SK Gubernur pembentukan Komite Advokasi Daerah, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau.</p> <p>Inisiasi Pembentukan tahun 2018 dilaksanakan di provinsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banten, 6 Maret 2018</li> <li>2. Kalimantan Barat, 8 Maret 2018</li> <li>3. Sulawesi Barat, 15 Maret 2018</li> <li>4. Sulawesi Tenggara, 28 Maret 2018</li> <li>5. Sumatera Selatan, 3 April 2018</li> <li>6. Kalimantan Utara, 4 April 2018</li> <li>7. Sumatera Utara, 25 April 2018</li> <li>8. Aceh, 27 April 2018</li> <li>9. Nusa Tenggara Barat, 3 Mei 2018</li> <li>10. Kalimantan Tengah, 4 Mei 2018</li> <li>11. DKI Jakarta, 9 Mei 2018</li> <li>12. Bali, 16 Mei 2018</li> <li>13. Sulawesi Utara, 5 Juli 2018</li> <li>14. Jambi, 6 Juli 2018</li> <li>15. Maluku Utara, 10 Juli 2018</li> <li>16. Bengkulu, 25 Juli 2018</li> <li>17. Kepulauan Riau, 2 Agustus 2018</li> <li>18. Maluku, 30 Agustus 2018</li> <li>19. Sumatera Barat, 30 Agustus 2018</li> <li>20. Papua, 5 September 2018</li> <li>21. Sulawesi Tengah, 14 September</li> <li>22. Papua Barat, 20 September 2018</li> <li>23. Sulawesi Selatan, 24 Oktober 2018</li> <li>24. Bangka Belitung, 30 Oktober 2018</li> <li>25. Gorontalo, 8 November 2018.</li> <li>26. Kalimantan Selatan, 12 Desember 2018</li> </ol> <p>Koordinasi Pendampingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawa Timur, 13 April 2018</li> <li>2. Jawa Barat, 18 April 2018</li> <li>3. DI Yogyakarta, 20 April 2018</li> <li>4. Lampung, 17 Juli 2018</li> <li>5. Riau, Pekanbaru, 20 Juli 2018</li> <li>6. Banten, 13 September 2018</li> <li>7. Sumatera Selatan, 26 September 2018</li> <li>8. Kalimantan Barat, 5 Oktober 2018</li> <li>9. Sulawesi Utara, 16 Oktober 2018</li> <li>10. Kalimantan Timur, 18 Oktober 2018</li> <li>11. Jawa Tengah, 30 Oktober 2018</li> <li>12. Nusa Tenggara Timur, 13 Desember 2018</li> </ol>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
3	Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	<p>Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli Pembangun Integritas (API, atau Indonesia Certified Integrity Officer) merupakan standar kompetensi yang telah dirumuskan bersama antara KPK dengan mitra kerja dari sektor swasta dan publik. SKKNI API bertujuan untuk membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 338 Tahun 2017.</p> <p>Delapan (8) Unit Kompetensi yang harus dibuktikan oleh seorang API, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang kebijakan integritas organisasi;</li> <li>2. Melaksanakan program integritas organisasi;</li> <li>3. Melakukan penilaian risiko korupsi;</li> <li>4. Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi;</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi;</li> <li>6. Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi;</li> <li>7. Memantau sistem integritas organisasi;</li> <li>8. Mengevaluasi sistem integritas organisasi.</li> </ol> <p>Kompetensi API dapat diakui dengan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui proses asesmen yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP P-II KPK). Proses sertifikasi akan terdiri dari pendaftaran (seleksi berkas), tes <i>online</i>, serta asesmen dalam bentuk pembuktian portofolio dan wawancara oleh asesor kompetensi.</p> <p>Adapun tahapan yang telah dilaksanakan pada 2018 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. F Finalisasi Skema Sertifikasi: 26 Maret 2018</li> <li>2. Peer Assessment Calon Asesor: 18 Mei 2018 (16 Asesor)</li> <li>3. Diklat dan Asesmen Calon Asesor: Gedung KPK, 21-25 Mei 2018</li> <li>4. Asesmen Batch I: 3-8 September 2018, dengan 24 asesi dinyatakan Kompeten sebagai Ahli Pembangun Integritas</li> <li>5. Asesmen Batch II: 21-23 November 2018, dengan 7 asesi dinyatakan Kompeten sebagai Ahli Pembangun Integritas</li> <li>6. Asesmen Batch III: 19-26 Desember 2018, dengan 8 asesi dinyatakan Kompeten sebagai Ahli Pembangun Integritas</li> </ol> <p>Hingga 2018, total API yang sudah tersertifikasi: 55 orang (16 asesor + 39 asesi)</p>
4.	Penyusunan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha	<p>Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang diikuti dengan tingginya keterlibatan pelaku usaha dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan latar belakang yang mendorong KPK menyusun buku Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha.</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		<p>Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) poin c Perma No. 13 Tahun 2016, bahwa salah satu bentuk kesalahan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah jika korporasi tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Oleh karenanya panduan yang berisi langkah-langkah pencegahan korupsi ini dibutuhkan sebagai acuan dan pedoman minimum bagi korporasi untuk menerapkan sistem pencegahan tindak pidana korupsi</p> <p>Penyusunan panduan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017. Di tahun 2018, dilaksanakan review dan finalisasi terhadap draf yang sudah dihasilkan dengan melibatkan Hakim Agung, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kementerian BUMN, pakar hukum, ekonomi dan <i>good governance</i>.</p> <p>Selain yang bersifat umum, disusun pula panduan yang lebih ringkas dan sederhana untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD dengan Kamar Dagang dan Indonesia: Gedung KPK, 23 Juli 2018</li> <li>• Pertemuan dengan Hakim Agung Prof. Surya Jaya untuk permohonan review panduan: Mahkamah Agung, 26 Juli 2018</li> <li>• Finalisasi dengan Pakar Hukum, Ekonomi, Good Governance, Kementerian BUMN: Gedung KPK, 11 Oktober 2018</li> </ul> </li> <li>b. Pedoman Kepatuhan Antikorupsi bagi Usaha Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiensi Finalisasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir: 11 April 2018</li> <li>• User Test dengan Pelaku UKM: Yogyakarta, 19 April 2018</li> <li>• User Test dengan Kementerian Koperasi dan UKM: Gedung KPK, 30 Mei 2018</li> </ul> </li> </ol>
5	International Business Integrity Conference (IBIC) 2018	<p>International Business Integrity Conference (IBIC) 2018 merupakan konferensi tahunan yang melibatkan mitra-mitra pencegahan di sektor swasta dalam rangka berbagi praktik terbaik dan menghasilkan paket rekomendasi untuk pembangunan integritas dan pencegahan korupsi di sektor bisnis.</p> <p>Pada tahun 2018, dilakukan sebagai rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), pada 4 – 5 Desember 2018 di Bidakara, Jakarta. Tercatat peserta yang teregistrasi mencapai 1031 peserta. Konferensi ini menghadirkan pembicara yang ahli di bidangnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang dibagi ke dalam berbagai sesi berikut:</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		<p>a. High Level Meeting: Business Integrity in National Anticorruption Strategy (Pembicara Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala Staf Kepresidenan)</p> <p>Kesimpulan/rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi yang baik antara pemerintah, publik, dan swasta sangat penting untuk bahu-membahu untuk memberantas korupsi. Karena korupsi berdampak pada kredibilitas negara, dan perekonomian.</li> <li>• Upaya pencegahan korupsi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pelaksanaan kompetisi yang sehat dalam kesempatan berusaha, mendorong inovasi dan kreatifitas perusahaan nasional, serta mengundang investasi untuk pembangunan.</li> <li>• Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mencegah korupsi dengan didukung sinergi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah dan swasta.</li> </ul> <p>b. Political Donation and Funding: How does the Business Deal with it? (Pembicara: Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Anti-Corruption Division of OECD, Indonesia Corruption Watch, Komisi Pemilihan Umum)</p> <p>Kesimpulan/rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suap melalui sumbangan politik menciptakan persaingan tidak sehat di antara perusahaan. Lingkaran jahat korupsi politik sangat terkait dengan pencalonan politik, kronisme bisnis, dan pengadaan pemerintah.</li> <li>• Transparansi pendanaan politik dan reformasi partai politik adalah hal yang penting. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan elit partai politik baik dari data internasional dan nasional membuktikan bahwa penanganan masalah korupsi di sektor politik menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan.</li> <li>• Indonesia perlu menetapkan regulasi yang jelas dan efektif terkait partai politik, pemilu, dan pilkada untuk mengurangi risiko korupsi. Hal ini termasuk mengenai kriminalisasi penyusunan melalui donasi politik dan pembentukan sistem integritas di partai politik, termasuk meningkatkan bantuan pendanaan partai politik yang bersumber dari negara.</li> <li>• Kontribusi perusahaan kepada kehidupan politik merupakan bentuk partisipasi konstitusi yang layak dilindungi dan didorong keberlangsungannya, namun transparansi atas sumbangan tersebut perlu ditingkatkan.</li> <li>• Penguatan sistem pencegahan korupsi di sektor swasta juga perlu dilakukan. Perusahaan dilarang memberikan donasi politik dengan tujuan mendapatkan kemudahan atau keistimewaan dalam bisnis, karena hal tersebut sudah dikategorikan sebagai suap.</li> </ul> <p>c. Anticorruption Guideline for Business: From Voluntary to Mandatory (Komisioner KPK, Staf Ahli Pengawasan Internal SKK Migas, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, Malaysian Anti-Corruption Commission, Petronas Malaysia, Johnson &amp; Johnson Indonesia, Tim Perumus SKKNI Ahli Pembangun Integritas, Unilever Indonesia, SustalN)</p> <p>Kesimpulan/rekomendasi:</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 13/2016 mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yang mensyaratkan korporasi untuk bertanggungjawab atas manfaat yang diterima dari perbuatan suap yang dilakukan tetapi juga atas pembiaran oleh korporasi dengan tidak menerapkan sistem pencegahan korupsi di dalam organisasi mereka.</li> <li>• Swasta merupakan pelaku korupsi terbesar kedua, termasuk adanya persekongkolan pemerintah dan korporasi. Komitmen tingkat tinggi dalam sebuah korporasi sangat penting dalam upaya mengimplementasikan pencegahan korupsi secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui analisa resiko dan kerentanan korupsi, serta membuat perangkat aturan/kebijakan anti korupsi yang jelas dan tegas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 4 tahap yaitu: Plan – Do – Check – Action.</li> <li>• Upaya pencegahan korupsi di sektor swasta dapat dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penerapan ISO 37001 dibuat tematik untuk anti korupsi. Standarisasi ini mencakup cara-cara untuk mengendalikan kebijakan antisuap dan bersifat fleksibel, dapat diaplikasikan di organisasi kecil, menengah sampai besar, sektor publik, BUMN, swasta ataupun NGO.</li> <li>o Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sebagai tunas pembangun pencegahan korupsi pada instansi dan pelaku usaha. Peran API adalah untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan terkait antikorupsi, serta menjadi narasumber pada organisasi terkait peraturan antikorupsi.</li> </ul> </li> </ul> <p>d. Anti-Corruption Measurement in Businesses (Pembicara: Transparency International, Transparency International Indonesia, KPMG, Deputi II Kantor Staf Presiden, Universitas Gadjah Mada)</p> <p>Kesimpulan/rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran sektor swasta dalam upaya pencegahan korupsi nasional adalah dengan membangun sistem pencegahan korupsi di masing-masing organisasi, dengan cara meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas dalam praktik bisnis. Setiap organisasi perlu mengidentifikasi risiko dan kerentanan korupsi, serta melakukan pengembangan sistem pengendalian dan kepatuhan untuk mencegah korupsi.</li> <li>• Setiap perusahaan perlu mengembangkan budaya perusahaan yang berintegritas, meningkatkan kapasitas seluruh elemen perusahaan, termasuk kompetensi <i>hard</i> dan <i>soft</i> dalam bidang antikorupsi, serta melakukan monitoring/pengukuran efektifitas program antikorupsi yang telah dikembangkan. Penggunaan teknologi juga akan membantu setiap perusahaan untuk melakukan pengukuran efektifitas existed anti-Bribery and anti-Corruption Program.</li> <li>• Selanjutnya seluruh <i>stakeholders</i> perlu berkolaborasi untuk melakukan aksi bersama untuk menyatakan tidak pada korupsi. Pemerintah juga harus menyediakan lingkungan yang baik untuk mendukung upaya ini, termasuk untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan dan adil, sistem pembayaran tanpa uang tunai, dan transparansi kepemilikan manfaat.</li> </ul>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		<p>e. Improving of Ease of Doing Business Through Public Engagement (NAC/RAC) (Pembicara: Komisioner KPK, Ketua KUPAS Kadin Indonesia, ICAC Hongkong, Deputi Promosi BKPM, Anti-Corruption Division of OECD)</p> <p><b>Kesimpulan/rekomendasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar etika harus berlaku untuk semua sektor, publik dan sektor swasta. Transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis akan membantu menciptakan ekonomi yang kompetitif dan sehat. Oleh karena itu, kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kemampuan daya saing berusaha bagi negara.</li> <li>Pembentukan Komite Advokasi Nasional dan Daerah adalah forum keterlibatan antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan aksi kolektif melawan korupsi. Kerjasama antara KPK, Komite Advokasi Nasional dan Daerah dan Satgas Ease of Doing Business diperlukan untuk bersama-sama untuk menentukan arah standar kemudahan berusaha.</li> <li>Diperlukan tujuan, energi dan upaya yang sama oleh pemerintah, kamar dagang, pelaku usaha, dan badan profesi untuk menerapkan etika bisnis. Indonesia perlu memiliki standar anti-suap yang berbiaya murah dan mudah diikuti agar mudah diikuti setiap level perusahaan, termasuk Usaha Kecil dan Menengah.</li> <li>Peran penting pemerintah adalah menciptakan izin usaha yang bersih dan transparan, memastikan integritas aparat penegak hukum dan mengelola konflik kepentingan untuk menciptakan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia.</li> </ul> <p>f. Improving Indonesia's Investment Climate Through Beneficial Ownership Transparency (Pembicara: Komisioner KPK, Ketua PPATK, Kepala Grup APU PPT OJK, Dirjen AHU Kemenkumham, HRMC UK, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)</p> <p><b>Kesimpulan/rekomendasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengusaha di Indonesia harus menyampaikan informasi secara transparan mengenai informasi kepemilikan usahanya baik yang memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung.</li> <li>Beneficial Ownership (BO) merujuk pada orang perorangan sehingga transparansi mengenai BO sangat penting untuk diimplementasikan dalam rangka membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan penegakan hukum yang adil.</li> <li>Transparansi BO penting karena struktur dan layer panjang yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan dan penegak hukum dalam menelusuri BO sebuah korporasi, serta dibutuhkan jejaring global dalam penelusuran tersebut</li> <li>Implementasi Single Investor ID (SID) sebagai salah satu sarana transparansi BO atas kepemilikan efek dan bank kustodian.</li> </ul>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
		<p>g. Digital Start-Up Contribution to Build Public Integrity (Pembicara: Komisioner KPK, Direktur Deregulasi BKPM, Bukalapak, Go-Jek, PPM Manajemen)</p> <p><b>Kesimpulan/rekomendasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam kegiatan memulai usaha dengan penggunaan Online Submission Service untuk memperoleh perizinan. Namun perlu ditambah dengan pengadaan komunikasi yang terbuka antara pelaku usaha dengan pemerintah.</li> <li>Indonesia harus mampu meningkatkan <i>competitive advantage</i> dengan membangun integritas di sektor publik salah satunya dengan prinsip <i>zero tolerance</i>.</li> <li>Industri digital masih sangat luas dan terbuka sepanjang kita masih bisa berkontribusi dengan integritas dan positif. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah harus membentuk regulasi yang mencakup industri digital, salah satunya kerangka hukum persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>

## 6. Kampanye Antikorupsi

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL
1	Anti Corruption Film Festival (ACFFEST) 2018	<p>Dalam rangka pencegahan korupsi melalui media film, KPK kembali menggelar Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 2018 setelah vakum selama 2 (dua) tahun terakhir. Film dipilih menjadi salah satu media dalam pencegahan korupsi mengingat film merupakan medium audio visual yang paling efektif untuk menyampaikan pesan antikorupsi pada seluruh lapisan masyarakat. Melalui film, nilai-nilai antikorupsi lebih cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.</p> <p>Program ACFFest 2018 berfokus pada kompetisi ide cerita film pendek dengan mengambil tema "Antikorupsi". KPK membuka kesempatan untuk para pembuat film mengirimkan ide film dalam bentuk proposal. Selain mendapatkan bantuan dana produksi, pembuat film juga berhak mengikuti Movie Camp, Coaching Clinic dari pembuat film profesional, fasilitas <i>online</i> editing di Jakarta, dan pendampingan mentor lokal di daerahnya masing-masing saat produksi film.</p> <p>Kompetisi ide cerita dibuka sejak 6 Juni-20 Agustus 2018. Untuk menjangkau peserta, KPK melaksanakan sosialisasi secara <i>online</i> melalui media sosial dan di 5 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Lampung, dan Banjarmasin. Selama masa pendaftaran, jumlah proposal yang masuk sebanyak 378 proposal. Selanjutnya, KPK memilih 7 proposal ide cerita yang paling menarik dan terbaik, yaitu:</p>

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL				
		NO	JUDUL FILM	NAMA PEN- GIRIM	KOTA	PROVINSI
		1	Baskara Ke Wukir	Latifah Fauzi-yyah R	Tegal	Jawa Tengah
		2	Blessed	Candra Aditya	Jakarta	DKI Jakarta
		3	Jimpitan	Wiwid Septiyardi	Yogyakarta	DI Yogyakarta
		4	Subur Itu Jujur	Gelora Yudhaswara	Ponorogo	Jawa Timur
		5	Kurang 2 Ons	Haris Supiandi	Pontianak	Kalimantan Barat
		6	Sebelah Mata	Jody Surendra	Jakarta	DKI Jakarta
		7	Sekeping Tanggung Jawab	Fitto Erig Arunfieldo	Bogor	Jawa Barat
		Setelah film diproduksi, dilaksanakan Premier Acffest 2018 di Bioskop CGV Grand Indonesia Jakarta pada 4 Desember 2018. Kemudian screening film di 4 kota yaitu, Pontianak, Ambon, Padang dan Jember. Roadshow ini akan berlanjut pada awal tahun 2019. Selama roadshow, diskusi dilakukan bersama mahasiswa, pelajar, akademisi, komunitas, dan pegiat film di daerah tujuan.				
2	Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi	<p>Kegiatan Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi, berupa serangkaian kegiatan penyadaran dan peningkatan partisipasi publik yang mendorong bentuk berupa aksi kolektif dan berkolaborasi dengan target sasaran masyarakat umum, yang terdiri atas pelajar, guru, mahasiswa, dosen, aparat pemerintahan, komunitas, dan lain-lain.</p> <p>Kegiatan roadshow Bus KPK ini dilaksanakan mengingat upaya mencegah korupsi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh KPK. KPK harus secara kongkrit berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan bagaimana cara melawan korupsi. Selain itu, mencegah korupsi dibutuhkan inovasi dan strategi, salah satunya dengan menghadirkan KPK secara langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menjembatani upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan masyarakat umum.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018 di 11 kota/kabupaten di Pulau Jawa:</p>				

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL									
		NO.	KOTA	KEGIATAN					MAHASISWA	JUMLAH	
ASN	SESI TK			SESI SD	SESI SMP	SESI SMA	umum				
				478	500	500	500	500	154	300	2932
		2	Kota Cirebon	98	100	100	100	100	547	300	1345
		3	Kota Tegal	85	75	75	75	75	264	374	1023
		4	Kota Pekalongan	185	75	75	75	75	220	260	965
		5	Kab. Semarang	125	100	100	100	100	134	200	859
		6	Kota Semarang	286	107	127	300	151	115	300	1386
		7	Klaten	825	150	150	150	150	448	200	2073
		8	Kota Magelang	150	150	150	150	1150	875	300	2925
		9	Purbalingga + Purwokerto	500	300	300	300	500	256	400	2556
		10	Ciamis	717	100	100	50	100	155	250	1472
		11	Bandung	300	200	200	200	200	325	300	1725
		JUMLAH		3749	1857	1877	2000	3101	3493	3184	19261
		<p>Kegiatan utama di setiap daerah berlangsung di tempat keramaian publik seperti alun-alun atau tempat lainnya, dengan menghadirkan peserta ke lokasi acara. Sementara kegiatan lain akan dilaksanakan di tempat lain secara paralel di kota bersangkutan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi setempat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi Antikorupsi untuk Pelajar dan Masyarakat Umum (Mendongeng, Playday Boardgames, Musik Akustik, Penyidik Cilik, Sosialisasi Antikorupsi, Pentas Budaya, Pemutaran Film, dll)</li> <li>2. Sosialisasi e-LHKPN</li> <li>3. Sosialisasi Gratifikasi</li> <li>4. Sosialisasi dan FGD Aplikasi JAGA</li> <li>5. Kuliah Umum di Kampus</li> <li>6. Sosialisasi Pengaduan Masyarakat</li> <li>7. Peninjauan Layanan Publik</li> </ol>									
3	Penyediaan Materi Kampanye Dan Komunikasi Antikorupsi	<p>Kegiatan kampanye antikorupsi membutuhkan materi untuk dipublikasikan. Adapun materi yang menjadi bahan kampanye terdiri dari berbagai bentuk, baik visual maupun audio visual yang penyebarannya bisa dilakukan secara daring dan luring. Media-media tersebut dipergunakan KPK untuk mengkampanye antikorupsi ke masyarakat, mulai dari nilai-nilai antikorupsi hingga dampak korupsi yang diharapkan memunculkan <i>awareness</i> masyarakat terhadap pencegahan korupsi.</p> <p>Pada 2018, materi kampanye yang telah diproduksi berupa film pendek, iklan layanan masyarakat, merchandise/perangkat sosialisasi, buku, DVD film, infografis, dan videografi, dengan rincian sebagai berikut:</p>									

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL			
		NO.	MATERI KAMPANYE	JUMLAH	KETERANGAN
		1	Film Pendek	7	Judul Film: (1) Baskara Ke Wukir, (2) Blessed, (3) Jujur itu Subur, (4) Jimpitan, (5) Kurang 2 Ons, (6) One Second, (7) Sekeping Tanggung Jawab
		2	Iklan Layanan Masyarakat	3	Judul PSA: (1) Curang Berulang, (2) Merayakan Kejujuran (3) SKTM
		3	Buku Antikorupsi	9	Total Produksi: 45.800 eksemplar
		4	DVD Film	4	1. DVD Sahabat Pemberani: 5.836 2. DVD Acfest: 5.231 pcs 3. DVD Dikti: 2.000 pcs 4. DVD Kumbi: 2.000 pcs
		5	Infografis	33	Konten: Litbang, Korsupgah, Gratifikasi, LHKPN, Dikyanmas, dll: 1. Wallpaper PC: 18 2. Medsos: 15
		6	Videografi	8	Konten: Litbang, Korsupgah, Gratifikasi, LHKPN, Dikyanmas, dll: 1. Medsos: 7 2. Bioskop: 1
		7	Merchandise/ Perangkat Sosialisasi	17	Total Produksi: 375.000 unit
		TOTAL		81	
4	Kerja Sama Kampanye Antikorupsi dengan BUMN/BUMD/PEMDA	<p>Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, KPK harus menyediakan materi dan panduan kampanye antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan kampanye antikorupsi secara mandiri. Tak kalah pentingnya, KPK mendorong upaya pencegahan ini untuk dilakukan bersama yang idealnya dilakukan secara simultan.</p> <p>Untuk memastikan penyebaran materi kampanye antikorupsi secara efektif, diperlukan kesepakatan dan diskusi antara KPK dengan instansi berkaitan. Harapannya dengan kegiatan ini tercipta gerakan kampanye antikorupsi yang tersebar di berbagai instansi. Materi-materi kampanye antikorupsi yang dibuat akan ditayangkan pada media dalam dan luar ruang yang ada serta dikelola oleh instansi masing-masing. Adapun jenis-jenis kampanye pencegahan korupsi bersifat dinamis dan terbuka serta manfaatnya ditujukan untuk masyarakat umum. Pada 2018, Kerja Sama Kampanye Antikorupsi dengan BUMN/BUMD/PEMDA telah dilaksanakan di instansi berikut ini:</p>			

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL		
		NO	INSTANSI	KEGIATAN
		1	PT. Kereta Api Indonesia	Placement Sahabat Pemberani dan ACFFest di Kereta Jarak Jauh Placement PSA Pencegahan di Stasiun Announcement Hari Antikorupsi di Stasiun Placement PSA di Video KRL Jabodetabek
		2	Bank Mandiri	Placement PSA di Videotron dan Lift Gedung Placement PSA Lift Gedung
		3	Pemkot Cirebon	Placement PSA Videotron
		4	Pemkot Semarang	Placement PSA Videotron
		5	PT. Garuda Indonesia	Placement Sahabat Pemberani dan ACFFest di TV Inflight Announcemenet Hari Antikorupsi
		6	PT. Angkasa Pura II	Placement PSA di Bandara AP 2
		7	PT. Pegadaian	Placement PSA Videotron
5	Pengelolaan Konten Pencegahan Korupsi di Media Sosial	<p>Program ini merupakan program pengembangan atas produk pencegahan yang dimiliki oleh KPK. Dalam hal ini, produk pencegahan diolah menjadi bentuk yang lebih mudah dan diberikan kepada masyarakat melalui media online. Sasarannya adalah generasi muda dan masyarakat perkotaan terutama yang sudah terpapar penggunaan media sosial.</p> <p>Kemasan yang dibuat ini berasal dari data yang diperoleh dari masing-masing bagian di kedeputan pencegahan. Data kemudian diolah dan dikemas dalam bentuk yang menarik, yaitu berupa infografis dan audio visual. Seluruh data disederhanakan dalam bentuk gambar dan video tanpa mengurangi keseluruhan data yang ingin disampaikan ke masyarakat. Tema yang dikembangkan pun beragam, yaitu informasi tentang pendidikan, politik, sumber daya alam, pengawalan koordinasi dan supervisi pencegahan. Media yang digunakan untuk distribusi konten adalah media sosial KPK, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, yang dikelola oleh Biro Humas KPK.</p>		

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL																																																																		
		Berikut adalah jumlah hits konten pencegahan korupsi di media sosial selama 2018:																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>BULAN</th> <th>FB</th> <th>TWITTER</th> <th>IG</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>April</td> <td>0</td> <td>269.364</td> <td>378.676</td> <td>648040</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mei</td> <td>22.718</td> <td>43.724</td> <td>108.391</td> <td>174833</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Juni</td> <td>197.100</td> <td>157.440</td> <td>0</td> <td>354540</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Juli</td> <td>238.008</td> <td>37.733</td> <td>348.658</td> <td>624399</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Agustus</td> <td>38.062</td> <td>77.036</td> <td>233.329</td> <td>348427</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>September</td> <td>49.201</td> <td>276.323</td> <td>269.646</td> <td>595170</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Oktober</td> <td>56.082</td> <td>386.313</td> <td>114.084</td> <td>556479</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>November</td> <td>92.613</td> <td>38.487</td> <td>301.209</td> <td>432309</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Desember</td> <td>12.250</td> <td>55.652</td> <td>69.175</td> <td>137077</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>3.871.274</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	BULAN	FB	TWITTER	IG	TOTAL	1	April	0	269.364	378.676	648040	2	Mei	22.718	43.724	108.391	174833	3	Juni	197.100	157.440	0	354540	4	Juli	238.008	37.733	348.658	624399	5	Agustus	38.062	77.036	233.329	348427	6	September	49.201	276.323	269.646	595170	7	Oktober	56.082	386.313	114.084	556479	8	November	92.613	38.487	301.209	432309	9	Desember	12.250	55.652	69.175	137077	Total					3.871.274
NO.	BULAN	FB	TWITTER	IG	TOTAL																																																															
1	April	0	269.364	378.676	648040																																																															
2	Mei	22.718	43.724	108.391	174833																																																															
3	Juni	197.100	157.440	0	354540																																																															
4	Juli	238.008	37.733	348.658	624399																																																															
5	Agustus	38.062	77.036	233.329	348427																																																															
6	September	49.201	276.323	269.646	595170																																																															
7	Oktober	56.082	386.313	114.084	556479																																																															
8	November	92.613	38.487	301.209	432309																																																															
9	Desember	12.250	55.652	69.175	137077																																																															
Total					3.871.274																																																															
6	Pameran Antikorupsi	<p>Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, KPK harus menyediakan materi dan panduan kampanye antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan kampanye antikorupsi secara mandiri. Tak kalah pentingnya, KPK mendorong upaya pencegahan ini untuk dilakukan bersama yang idealnya dilakukan secara simultan.</p> <p>Untuk memastikan penyebaran materi kampanye antikorupsi secara efektif, diperlukan kesepakatan dan diskusi antara KPK dengan instansi berkaitan. Harapannya dengan kegiatan ini tercipta gerakan kampanye antikorupsi yang tersebar di berbagai instansi. Materi-materi kampanye antikorupsi yang dibuat akan ditayangkan pada media dalam dan luar ruang yang ada serta dikelola oleh instansi masing-masing. Adapun jenis-jenis kampanye pencegahan korupsi bersifat dinamis dan terbuka serta manfaatnya ditujukan untuk masyarakat umum. Pada 2018, Kerja Sama Kampanye Antikorupsi dengan BUMN/BUMD/PEMDA telah dilaksanakan di instansi berikut ini:</p>																																																																		

NO.	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/HASIL																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Kegiatan</th> <th>Tanggal Kegiatan</th> <th>Tempat Kegiatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pameran PBJ Kemenkeu</td> <td>Maret 2018</td> <td>Kantor Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pameran HUT PPATK</td> <td>13 April 2018</td> <td>Halaman Gedung PPATK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pameran Pesta Pendidikan</td> <td>4-6 Mei 2018</td> <td>Plaza Insan Berprestasi, Kemendibud</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pameran Festival Film Pelajar</td> <td>22-24 November 2018</td> <td>Plaza Insan Berprestasi, Kemendibud</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pameran HAKORDIA 2018</td> <td>4-5 Desember 2018</td> <td>Gedung Bidakara Jakarta</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pameran IBIC 2018</td> <td>4-5 Desember 2018</td> <td>Gedung Bidakara Jakarta</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan	1	Pameran PBJ Kemenkeu	Maret 2018	Kantor Kemenkeu	2	Pameran HUT PPATK	13 April 2018	Halaman Gedung PPATK	3	Pameran Pesta Pendidikan	4-6 Mei 2018	Plaza Insan Berprestasi, Kemendibud	4	Pameran Festival Film Pelajar	22-24 November 2018	Plaza Insan Berprestasi, Kemendibud	5	Pameran HAKORDIA 2018	4-5 Desember 2018	Gedung Bidakara Jakarta	6	Pameran IBIC 2018	4-5 Desember 2018	Gedung Bidakara Jakarta
No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan																											
1	Pameran PBJ Kemenkeu	Maret 2018	Kantor Kemenkeu																											
2	Pameran HUT PPATK	13 April 2018	Halaman Gedung PPATK																											
3	Pameran Pesta Pendidikan	4-6 Mei 2018	Plaza Insan Berprestasi, Kemendibud																											
4	Pameran Festival Film Pelajar	22-24 November 2018	Plaza Insan Berprestasi, Kemendibud																											
5	Pameran HAKORDIA 2018	4-5 Desember 2018	Gedung Bidakara Jakarta																											
6	Pameran IBIC 2018	4-5 Desember 2018	Gedung Bidakara Jakarta																											

### 7. Kerja Sama Kampanye Antikorupsi Dengan TVRI

NO	INSTANSI	KERJA SAMA PROGRAM	PELAKSANAAN
1	TVRI Nasional	MoU KPK-TVRI	18 September 2018
		Kupas Kandidat	15 Maret- 7 Juni 2018
		Semangat Pagi Indonesia	April - Oktober 2018
		Indonesia Bicara	April - September 2018
2	TVRI Sulawesi Tenggara	Program Cerdas Cermat Sultra Berintegritas	25 Juli-24 Oktober 2018
		Komite Advokasi Daerah	27-29 Maret 2018
		Pilkada Berintegritas	17-20 April 2018
3	TVRI Sumatera Selatan	Pilkada Berintegritas	9-11 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	3-5 April 2018
4	TVRI Jawa Barat	Promo ACFFEST	8-10 Agustus 2018
		Pilkada Berintegritas	16-18 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	17-18 April 2018
5	TVRI Bangka Belitung	Pilkada Berintegritas	4-6 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	29-31 Oktober 2018
6	TVRI Banten & DKI	Komite Advokasi Daerah	12-13 September 2018
7	TVRI Kalimantan Barat	Komite Advokasi Daerah	4-5 Oktober 2018
		Pilkada Berintegritas	7-9 Mei 2018
		Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018

NO	INSTANSI	KERJA SAMA PROGRAM	PELAKSANAAN
8	TVRI Kalimantan Selatan	Komite Advokasi Daerah	10-12 Desember 2018
9	TVRI Gorontalo	Komite Advokasi Daerah	7-9 November 2018
10	TVRI Ambon	Pilkada Berintegritas	24-26 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	28-31 Agustus 2018
11	TVRI Bengkulu	Komite Advokasi Daerah	24-26 Juli 2018
12	TVRI Sumatera Barat	Promo ACFFEST	19-21 Desember 2018
		Komite Advokasi Daerah	29-31 Agustus 2018
13	TVRI Jawa tengah	Roadshow Bus	11 Oktober 2018
		Talkshow Pendidikan	
14	TVRI Jawa Timur	Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
15	TVRI Sulawesi Selatan	Jambore Antikorupsi	22-24 Oktober 2018
		Komite Advokasi Daerah	23-25 Oktober 2018
		Pilkada Berintegritas	17 April 2018
16	TVRI Sulawesi Utara	Komite Advokasi Daerah	4-6 Juli 2018
		Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
17	TVRI Sulawesi Tengah	Komite Advokasi Daerah	12-14 September 2018
18	TVRI Papua	Komite Advokasi Daerah	4-7 September 2018
19	TVRI Jambi	Komite Advokasi Daerah	3-5 Juli 2018
20	TVRI Aceh	Komite Advokasi Daerah	25-27 April 2018
		Pilkada Berintegritas	25-27 April 2018
21	TVRI NTT	Pilkada Berintegritas	3-4 Mei 2018
		Komite Advokasi Daerah	11-13 September 2018
22	TVRI Bali	Promo ACFFEST	2-4 Agustus 2018
		Komite Advokasi Daerah	14-16 Mei 2018
23	TVRI Sulawesi Barat	Komite Advokasi Daerah	14-16 Maret
24	TVRI Kalimantan Tengah	Komite Advokasi Daerah	3-5 Mei 2018
25	TVRI Kalimantan Timur	Komite Advokasi Daerah	26-28 September 2018
26	TVRI Sumatera Utara	Komite Advokasi Daerah	23-25 April 2018

### KERJA SAMA KAMPANYE ANTIKORUPSI DENGAN RRI

NO	INSTANSI	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	RRI Nasional	MoU KPK-RRI	18 September 2018
2	RRI Sulawesi Utara	Komite Advokasi Daerah	4-6 Juli 2018
		Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
3	RRI Sulawesi Tenggara	Komite Advokasi Daerah	27-29 Maret 2018
		Pilkada Berintegritas	17-20 April 2018
4	RRI Sumatera Selatan	Pilkada Berintegritas	9-11 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	3-5 April 2018

NO	INSTANSI	KEGIATAN	PELAKSANAAN
5	RRI Jawa Barat	Promo ACFFEST	8-10 Agustus 2018
		Pilkada Berintegritas	16-18 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	17-18 April 2018
6	RRI Banten	Komite Advokasi Daerah	12-13 September 2018
7	RRI Kalimantan Barat	Komite Advokasi Daerah	4-5 Oktober 2018
		Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018
8	RRI Kalimantan Utara	Komite Advokasi Daerah	3-5 April 2018
9	RRI Gorontalo	Komite Advokasi Daerah	7-9 November 2018
10	RRI Ambon	Pilkada Berintegritas	24-26 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	28-31 Agustus 2018
11	RRI Bengkulu	Komite Advokasi Daerah	24-26 Juli 2018
12	RRI Sumatera Barat	Promo ACFFEST	19-21 Desember 2018
		Komite Advokasi Daerah	29-31 Agustus 2018
13	RRI Lampung	Promo ACFFEST	8-10 Agustus 2018
14	RRI Jawa Tengah	Roadshow Bus	11 Oktober 2018
15	RRI Jawa Timur	Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
16	RRI Sulawesi Utara	Komite Advokasi Daerah	4-6 Juli 2018
		Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
17	RRI Papua	Komite Advokasi Daerah	4-7 September 2018
18	RRI NTT	Pilkada Berintegritas	3-4 Mei 2018
		Komite Advokasi Daerah	11-13 September 2018
19	RRI Jambi	Komite Advokasi Daerah	3-5 Juli 2018
20	RRI Papua Barat	Komite Advokasi Daerah	19-21 September 2018
21	RRI Sulawesi Barat	Komite Advokasi Daerah	14-16 Maret
22	RRI Kalimantan Selatan	Komite Advokasi Daerah	10-12 Desember 2018
23	RRI Maluku Utara	Komite Advokasi Daerah	8-11 Juli 2018
24	RRI Kalimantan Tengah	Komite Advokasi Daerah	3-5 Mei 2018
25	RRI Kepulauan Riau	Komite Advokasi Daerah	1-3 Agustus 2018
26	RRI Kalimantan Timur	Komite Advokasi Daerah	26-28 September 2018
27	RRI Bali	Komite Advokasi Daerah	14-16 Mei 2018
28	RRI Sulawesi Tengah	Komite Advokasi Daerah	12-14 September 2018
29	RRI Sulawesi Selatan	Komite Advokasi Daerah	23-25 Oktober 2018
30	RRI Aceh	Komite Advokasi Daerah	25-27 April 2018



### 8. Kerja Sama Kampanye Antikorupsi Dengan TVRI dan RRI

NO	INSTANSI	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	RRI Nasional	MoU KPK-RRI	18 September 2018
2	RRI Sulawesi Utara	Komite Advokasi Daerah	4-6 Juli 2018
		Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
3	RRI Sulawesi Tenggara	Komite Advokasi Daerah	27-29 Maret 2018
		Pilkada Berintegritas	17-20 April 2018
4	RRI Sumatera Selatan	Pilkada Berintegritas	9-11 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	3-5 April 2018
5	RRI Jawa Barat	Promo ACFFEST	8-10 Agustus 2018
		Pilkada Berintegritas	16-18 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	17-18 April 2018
6	RRI Banten	Komite Advokasi Daerah	12-13 September 2018
7	RRI Kalimantan Barat	Komite Advokasi Daerah	4-5 Oktober 2018
		Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018
8	RRI Kalimantan Utara	Komite Advokasi Daerah	3-5 April 2018
9	RRI Gorontalo	Komite Advokasi Daerah	7-9 November 2018
10	RRI Ambon	Pilkada Berintegritas	24-26 April 2018
		Komite Advokasi Daerah	28-31 Agustus 2018
11	RRI Bengkulu	Komite Advokasi Daerah	24-26 Juli 2018
12	RRI Sumatera Barat	Promo ACFFEST	19-21 Desember 2018
		Komite Advokasi Daerah	29-31 Agustus 2018
13	RRI Lampung	Promo ACFFEST	8-10 Agustus 2018
14	RRI Jawa Tengah	Roadshow Bus	11 Oktober 2018
15	RRI Jawa Timur	Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
16	RRI Sulawesi Utara	Komite Advokasi Daerah	4-6 Juli 2018
		Pilkada Berintegritas	11-12 April 2018
17	RRI Papua	Komite Advokasi Daerah	4-7 September 2018
18	RRI NTT	Pilkada Berintegritas	3-4 Mei 2018
		Komite Advokasi Daerah	11-13 September 2018
19	RRI Jambi	Komite Advokasi Daerah	3-5 Juli 2018
20	RRI Papua Barat	Komite Advokasi Daerah	19-21 September 2018
21	RRI Sulawesi Barat	Komite Advokasi Daerah	14-16 Maret
22	RRI Kalimantan Selatan	Komite Advokasi Daerah	10-12 Desember 2018
23	RRI Maluku Utara	Komite Advokasi Daerah	8-11 Juli 2018
24	RRI Kalimantan Tengah	Komite Advokasi Daerah	3-5 Mei 2018
25	RRI Kepulauan Riau	Komite Advokasi Daerah	1-3 Agustus 2018
26	RRI Kalimantan Timur	Komite Advokasi Daerah	26-28 September 2018
27	RRI Bali	Komite Advokasi Daerah	14-16 Mei 2018
28	RRI Sulawesi Tengah	Komite Advokasi Daerah	12-14 September 2018

NO	INSTANSI	KEGIATAN	PELAKSANAAN
29	RRI Sulawesi Selatan	Komite Advokasi Daerah	23-25 Oktober 2018
30	RRI Aceh	Komite Advokasi Daerah	25-27 April 2018

### 9. Kerja Sama Kampanye Antikorupsi Dengan Media Lokal

NO	INSTANSI	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Sonora Bandung	Roadshow Bus	30-31 Oktober 2018
2	Radio MGT Bandung	Roadshow Bus	30-31 Oktober 2018
3	Sonora Bangka	Pilkada Berintegritas	4-6 April 2018
4	Bangka Pos	Media Visit Pilkada berintegritas	4-6 April 2018
5	Radio Banjarmasin	Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018
6	J-Radio Banjarmasin	Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018
7	Sonora Lampung	Promo ACFFEST	8-10 Agustus 2018
8	Sonora Surabaya	Komite Advokasi Daerah	12-13 April 2018
9	Sonora Makassar	Jambore Antikorupsi	22-24 Oktober 2018
10	I-Radio Makassar	Jambore Antikorupsi	22-24 Oktober 2018
11	Radio Prambors Jakarta	Promo ACFFEST	8-10 Agustus 2018
12	Sonora Bali	Promo ACFFEST	2-4 Agustus 2018
13	OZ Radio Bali	Promo ACFFEST	2-4 Agustus 2018
14	UTY FM Yogyakarta	Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018
15	Swara Gama FM Yogyakarta	Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018
16	Geronimo FM Yogyakarta	Promo ACFFEST	27-29 Juli 2018

### 10. Rekapitulasi Kegiatan Dikyanmas Berdasarkan Jenis Kegiatan Dan Wilayah/Provinsi

NO.	WILAYAH / PROVINSI	JENIS KEGIATAN		TOTAL
		NARASUMBER	PROGRAM TIM	
1	Jabodetabek	162	48	210
2	Aceh	1	3	4
3	Bali	6	4	10
4	Banten	13	9	22
5	Bengkulu	0	1	1
6	D.I. Yogyakarta	9	15	24
7	Gorontalo	1	6	7
8	Jambi	1	1	2
9	Jawa Barat	27	12	39
10	Jawa Tengah	12	20	32

NO.	WILAYAH / PROVINSI	JENIS KEGIATAN		TOTAL
		NARASUMBER	PROGRAM TIM	
11	Jawa Timur	19	10	29
12	Kalimantan Barat	0	9	9
13	Kalimantan Selatan	2	4	6
14	Kalimantan Tengah	1	2	3
15	Kalimantan Timur	3	1	4
16	Kalimantan Utara	0	0	0
17	Kepulauan Bangka Belitung	0	2	2
18	Kepulauan Riau	1	1	2
19	Lampung	3	1	4
20	Maluku	2	6	8
21	Maluku Utara	0	4	4
22	Nusa Tenggara Barat	1	3	4
23	Nusa Tenggara Timur	0	4	4
24	Papua	0	1	1
25	Papua Barat	0	2	2
26	Riau	3	6	9
27	Sulawesi Barat	0	1	1
28	Sulawesi Selatan	5	10	15
29	Sulawesi Tengah	1	0	1
30	Sulawesi Tenggara	3	4	7
31	Sulawesi Utara	0	3	3
32	Sumatera Barat	6	5	11
33	Sumatera Selatan	0	3	3
34	Sumatera Utara	3	6	9

### 11. Audiensi/Kunjungan Ke Kantor KPK

No.	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Jumlah Peserta
1	Alsa Universitas Jember	12 Maret 2018	47
2	Universitas Mpu Tantular	11 April 2018	26
3	Universitas Kristen Satyawacana	11 April 2018	88
4	Universitas Atmajaya Yogyakarta	17 April 2018	150
5	STIE Ekuitas	18 April 2018	60
6	Universitas Andalas	19 April 2018	16
7	Hima Akuntansi FEB Universitas Andalas	23 April 2018	20
8	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	23 April 2018	16
9	IAIN Salatiga	25 April 2018	157
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	09 Mei 2018	33
11	FH Universitas Balikpapan	08 Mei 2018	13

No.	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Jumlah Peserta
12	Sekolah Tinggi Internasional Harvest (STTIH)	15 Mei 2018	25
13	BEM Universitas Indonesia	15 Mei 2018	11
14	Himpunan Mahasiswa Islam	23 Mei 2018	6
15	FH Universitas Muhammadiyah Sukabumi	10 Juli 2018	38
16	Universitas Muhammadiyah Makassar	12 Juli 2018	76
17	Universtas Muhammadiyah Palembang	05 Juli 2018	183
18	STAN Bintaro	09 Juli 2018	42
19	FH Universitas Bandar Lampung	30 Juli 2018	80
20	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	25 Juli 2018	40
21	Lembaga Administrasi Negara RI	18 Juli 2018	40
22	FH Universitas Ahmad Dahlan	01 Agustus 2018	174
23	Universitas Negeri Semarang	07 Agustus 2018	120
24	UIN Raden Fatah Palembang	07 Agustus 2018	51
25	Indonesia Student & Youth Forum	10 Agustus 2018	295
26	STIH Sumpah Pemuda Palembang	09 Agustus 2018	
27	FH Universitas Hang Tuah Surabaya	13 Agustus 2018	140
28	FH Universitas Gorontalo	29 Agustus 2018	25
29	Universitas Pancasakti Tegal	10 September 2018	59
30	Universitas Sebelas Maret	10 September 2018	45
31	Universitas Islam Malang	13 September 2018	45
32	Yayasan Rahmany Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmaniayah	19 September 2018	35
33	Universitas Islam Malang	11 September 2018	48
34	Sekolah Dian Harapan Lippo Village	25 September 2018	110
35	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	26 September 2018	100
36	Sekolah Kristen Calvin	27 September 2018	71
37	Sekolah Anak Panah	04 Oktober 2018	80
38	SMP Global Islamic School	04 Oktober 2018	136
39	SMA Islam Al - Azhar 7	10 Oktober 2018	81
40	SMA Al-Azhar 7	10 Oktober 2018	90
41	Universitas Galuh	11 Oktober 2018	100
42	Universitas Udayana	23 Oktober 2018	25
43	Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Dewan Pimpinan Cabang	23 Oktober 2018	15
44	Lembaga Kajian Keilmuan, UI	31 Oktober 2018	55
45	SMA Islam Athirah Bukit Baruga	11 Oktober 2018	70
46	Global Islamic School Junior High School	10 Oktober 2018	148
47	Madrasah Aliyah Sahid	29 Oktober 2018	210
48	Lembaga Kajian Keilmuan, UI	31 Oktober 2018	55

No.	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Jumlah Peserta
49	SMA Islam Athirah Bukit Baruga	11 Oktober 2018	70
50	Global Islamic School Junior High School	10 Oktober 2018	148
51	Yayasan Mata Hati Care Centre	12 November 2018	20
52	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	14 November 2018	140
53	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	06 November 2018	52
54	Universitas Islam Indonesia	12 November 2018	60
55	Universitas Bandar Lampung	12 November 2018	55
56	SMK IT Al-Muqowamah	14 November 2018	94
57	SMAK Penabur	01 November 2018	50
58	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	19 November 2018	80
59	SMA Tugu Ibu 1 Depok	14 November 2018	55
60	Universitas Sanata Dharma	29 November 2018	80
61	Universitas Galuh Ciamis	14 Desember 2018	232
62	Universitas Muhammadiyah Jakarta	17 Desember 2018	40
63	Kosmik UI	24 Desember 2018	26
<b>TOTAL PESERTA</b>			<b>4752</b>